

PARTISIPASI FATAYAT NAHDLATUL ULAMA SIDOARJO DALAM PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEREMPUAN

Maya Nur Agustin

12040254051 (S1 PPKn, FISH, UNESA) mayanur002@gmail.com

Maya Mustika Kartika Sari

0014057403 (PPKn, FISH, UNESA) mayamustika@unesa.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan partisipasi Pimpinan Cabang Fatayat NU Sidoarjo dalam pendidikan politik bagi perempuan. Partisipasi mengindikasikan adanya suatu pergerakan dan perbuatan yang nyata. Dalam mewujudkan perempuan yang sadar mengenai nilai-nilai kewarganegaraan, salah satunya ialah dengan melalui upaya mendorong partisipasi dengan memberikan pendidikan politik. Pendidikan Politik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini merupakan empat pengurus Pimpinan Cabang Fatayat Nahdlatul Ulama yang memiliki kriteria sebagai anggota Fatayat yang aktif minimal lima tahun dan merupakan pengurus PC dan PAC. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam pendidikan politik yang dilakukan oleh PC Fatayat NU Sidoarjo dilakukan dengan secara struktural dan kultural. Secara struktural dilakukan secara formal oleh para kader Fatayat NU yang berada di lingkup Pimpinan Cabang. Sedangkan Secara kultural, partisipasi yang dilakukan Fatayat NU dengan memberikan pengetahuan politik kepada perempuan selain anggota Fatayat melalui tim turun kebawah (turba). Adanya keterlibatan warga negara di dalam kegiatan sosial atau *civic engagement* ditunjukkan oleh Fatayat NU selaku organisasi keagamaan memainkan keterlibatan di dalam kelompok sosial secara sukarela yang diberikan kepada perempuan. Dalam hubungan sosialnya dengan masyarakat, Fatayat NU melakukan partisipasi secara sukarela dalam pendidikan politik yang diharapkan dapat menumbuhkan pengetahuan dan partisipasi politik warga negara.

Kata Kunci: Fatayat NU, Pendidikan Politik, Partisipasi Perempuan

Abstract

The purpose of this study is to describe the leadership participation of Head Branch Fatayat NU Sidoarjo in political education for women. Participation indicates a movement and real action. In realizing women are aware of values of citizenship, one through efforts to encourage participation by providing political education. The purpose of political education to improve public awareness of their rights and duties in nation and state. This study use qualitative approach. The data collecting techniques which be used are interview and documentation. The informen of this study are the four head branch of fatayat Nahdlatul Ulama who has criteria as a member active of fatayat least five years and is the PC and PAC. The result of the study shows that political education participation conducted by PC Fatayat NU Sidoarjo done with structurally and its cultural. Structurally done formally by kaders Fatayat NU who was in the sphere of Head Branch of. While is culturally, participation conducted Fatayat NU by giving political knowledge to woman other than a member of team Fatayat through descended beneath (turba). The involvement of citizens in social events or civic engagement indicated by Fatayat NU as a religious organization plays engagement at in social groups voluntarily given to women. In relations social with the community, Fatayat NU participated voluntarily in political education that are supposed to be grow knowledge and political participation citizens.

Keyword: Fatayat NU, Political Education, The Participation of Women

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban bagi semua warga negaranya. Pada negara yang mengalami

perubahan mendasar ke arah sistem demokrasi, salah satunya ditandai oleh adanya *civil society* yang ditandai oleh adanya sekelompok individu secara sadar dan sukarela terlibat dalam kegiatan publik. Hal tersebut menunjukkan bahwa asosiasi-asosiasi yang sedang

mengalami euforia di masa reformasi dapat membatasi kekuasaan negara dan meningkatkan peran masyarakat (Gatara, 2007:204).

Salah satu bentuk keterlibatan kelompok asosiasi di Indonesia nampak pada organisasi keagamaan Fatayat NU. Melalui berbagai kegiatan yang ada dalam kelompok Fatayat, perempuan-perempuan yang ada dalam kelompok tersebut dapat menyuarakan berbagai aspirasi kepentingan mereka baik yang bersifat kelompok maupun individual. Dalam hal ini Fatayat NU berperan sebagai sarana bagi para anggotanya untuk mampu mengembangkan diri dan lebih sensitif terhadap isu-isu perpolitikan.

Melalui Fatayat NU, diharapkan mampu dalam mengembangkan kesadaran kritis perempuan di ruang publik. Kesadaran tersebut juga ditularkan kepada masyarakat dengan harapan bahwa Fatayat NU dapat mewujudkan masyarakat yang berkeadilan gender dan memiliki kemampuan mumpuni di masyarakat. Harapan tersebut diwujudkan oleh Fatayat dengan memberikan pelatihan keterampilan baik pada kader maupun perempuan non kader. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Fatayat NU turut memberikan pelatihan seperti dengan memberikan pendidikan politik.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan politik adalah proses pemahaman dan pembelajaran tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik turut berperan dalam menjadikan warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan politik menurut Affandi (1996:27) ialah sebagai alat untuk mempertahankan sikap dan norma politik dan meneruskannya dari satu generasi ke generasi berikutnya, baik melalui akulturasi informal maupun melalui pendidikan politik yang direncanakan untuk menunjang stabilitas sistem politik.

Labolo (2015:22) mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan politik adalah untuk meningkatkan solidaritas politik dalam menjaga dan menjaga dan memelihara integritas bangsa. Bagi masyarakat, pendidikan politik bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan dengan diselenggarakannya pendidikan tersebut akan mendorong partisipasi politik baik dari kader dan pengurus serta masyarakat.

Fatayat NU sebagai organisasi keagamaan dapat memainkan peranan besar dalam merangsang aksi-aksi sosial dan politik untuk mempengaruhi adanya kebijakan

publik. Fatayat NU menyediakan alternatif tumbuhnya *civil society* yang sehat dan menyumbangkan keterbukaan politik di masa depan. Fatayat NU diharapkan mampu menjadi figur dalam memberikan contoh dan penyadaran politik kepada kaum perempuan di ranah politik serta memberikan pendidikan politik berupa kajian atau pelatihan baik secara langsung maupun tidak langsung tentunya dengan mengedepankan komunikasi politik yang baik agar penyampaian pesan kepada masyarakat dapat sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan, Pimpinan Cabang Fatayat NU Sidoarjo memiliki peranan dalam ikut serta memberikan pendidikan politik bagi anggotanya dan juga masyarakat. Pendidikan politik diberikan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai solidaritas politik serta meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sedangkan pada anggota Fatayat NU, pendidikan politik diberikan agar mampu menjadi perantara aspirasi yang baik bagi masyarakat.

Tabel 1
Daftar Jumlah Pimpinan Ranting se-Kabupaten
Sidoarjo Tahun 2015

No	Nama PAC	Jumlah Ranting
1.	Porong	20
2.	Prambon	20
3.	Candi	20
4	Sedati	20
5.	Krian	20
6.	Tarik	20
7.	Sukodono	20
8.	Krembung	19
9.	Tanggulangin	20
10.	Jabon	18
11.	Wonoayu	18
12.	Balongbendo	21
13.	Waru	25
14.	Tulangan	24
15.	Sidoarjo	23
16.	Taman	13
17.	Buduran	15
18.	Gedangan	13
Jumlah		349

Sumber: arsip PC Fatayat NU Sidoarjo, 2015

Fatayat NU Pimpinan Cabang Sidoarjo memiliki 18 Pimpinan Anak Cabang dan 349 Pimpinan Ranting. Fatayat NU PC Sidoarjo merupakan organisasi perempuan yang tergolong aktif. Hal tersebut tercermin karena dalam aktivitas Fatayat NU PC Sidoarjo terdapat beberapa program kerja seperti pengembangan organisasi dan pengkaderan, hukum, politik, dan advokasi, ekonomi, dakwah dan pembinaan anggota, dan banyak aktivitas lainnya. Selain itu, Fatayat NU Pimpinan Cabang

Sidoarjo menjalankan salah satu program kerja dalam bidang politik seperti melakukan pemberdayaan perempuan dengan berbagai program diantaranya pendidikan politik untuk perempuan dan melakukan gerakan penyadaran hukum dan politik di masyarakat.

Sebagai organisasi keagamaan, Fatayat NU harus memiliki pondasi pengetahuan yang baik mengenai politik agar dapat memantau proses politik bernegara yang berlangsung secara demokratis. Namun kenyataan yang terjadi dilapangan bahwa belum semua anggota Fatayat NU dan masyarakat memiliki pengetahuan yang baik mengenai politik, padahal Sidoarjo merupakan basis otonom (Banom) muslimat dan Fatayat NU dimana sering dimanfaatkan oleh para calon pada saat pemilihan legislatif. Oleh sebab itu perlu diberikan pendidikan politik bagi para anggota Fatayat dan masyarakat agar memiliki kontrol yang baik dan dapat meningkatkan solidaritas politik dalam menjaga dan memelihara integritas bangsa.

Robert A. Dahl (dalam Gatara, 2007:190) menyatakan bahwa setidaknya ada enam lembaga yang dibutuhkan dalam penerapan demokrasi yakni pertama, para pejabat yang dipilih. Kedua, pemilihan umum yang jujur, adil, bebas, dan berperiodik. Ketiga, kebebasan berpendapat. Warga negara berhak menyatakan pendapat mereka tanpa ada halangan dan ancaman dari penguasa. Keempat, akses informasi-informasi alternatif. Kelima, otonomi asosiasional, yakni warga negara berhak membentuk perkumpulan atau organisasi yang relatif bebas, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan. Keenam, hak kewarganegaraan yang inklusif.

Menurut Azra (2005:135-137) harapan baru tumbuhnya demokrasi di Indonesia pada era reformasi menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi di Indonesia. Transisi menuju demokrasi menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dimana asosiasi dalam masyarakat sipil lebih dimungkinkan untuk berfungsi secara lebih baik. Suksesnya transisi demokrasi di Indonesia salah satunya ada dalam peran *civil society* atau masyarakat madani. Lipset (dalam Azra, 2005:137) membuktikan bahwa *civil society* atau masyarakat madani dapat berpengaruh secara benefisial terhadap kultur politik. Adanya partisipasi *civil society* dapat mengajarkan nilai-nilai demokrasi.

A.S Hikam (dalam Gatara, 2007:164-167) mengartikan *civil society* sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain keswasembadaan dan keswadayaan, kesukarelaan, keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti warganya, dan kemandirian tinggi berhadapan dengan negara. *Civil society* paling tidak memiliki tiga ciri utama, seperti yang disebutkan A.S Hikam (dalam Gatara, 2007:167) yaitu:

“(1) Adanya kemandirian yang cukup tinggi dari individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat, terutama ketika berhadapan dengan negara. (2) Adanya ruang publik bebas sebagai wahana bagi keterlibatan politik (*political state*) secara aktif dari warga melalui wacana dan praktis yang berkaitan dengan kepentingan publik. (3) Adanya kemampuan untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak intervensionis.”

Indonesia memiliki tradisi kuat tentang *civil society* atau masyarakat madani, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perkembangan pesat dan kiprah dari beragam organisasi sosial keagamaan dan pergerakan nasional dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Selain berperan sebagai organisasi perjuangan penegakan HAM dan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial, organisasi berbasis Islam, seperti Sarekat Islam (SI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah telah menunjukkan kiprahnya sebagai komponen dari *civil society*. Sifat kemandirian dan sukarelaan para pengurus dan anggota organisasi tersebut merupakan karakter khas dari sejarah masyarakat madani di Indonesia (Hidayat, 2008:204).

Secara historis, agama telah memainkan peranan besar dalam merangsang aksi-aksi sosial dan politik untuk melawan kekuasaan politik dan ideologi negara yang sangat dominan (Hikam, 2015:150). Munculnya organisasi non pemerintahan yang didasarkan pada organisasi keagamaan adalah salah satu diantara yang paling mutakhir dan bisa diharapkan dimasa depan sebagai agen *social empowerment* (pemberdayaan masyarakat). Pengaruh timbulnya kesadaran keagamaan semacam ini terhadap kehidupan politik Indonesia khususnya terhadap kebangkitan *civil society*.

Dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, maka diperlukan pendidikan kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia. Numan Somantri (dalam Hidayat, 2008:6-7) merumuskan pengertian Ilmu Kewarganegaraan membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam perkumpulan yang terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik) serta hubungan individu-individu dengan negara.

Civic education memiliki tiga komponen yang perlu dimiliki oleh seorang warga agar menjadi cerdas, berkarakter, dan partisipatif, yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition*. Adanya tiga komponen utama dalam pendidikan kewarganegaraan tersebut turut diutarakan oleh Branson (dalam Winarno, 2014:26) yaitu:

“What are essential component of a good civic education? There are three essential components: civic knowledge, civics skills, and civic disposition. The first essential component of civic education is civic knowledge that

concerned with the content or what citizens ought to know; the subject matter, if you will. The second essential component of civic education in a democratic society is civic skill: intellectual and participatory skills. The third essential of civic education, civic dispositions, refers to the traits of private and public character essential to the maintenance and improvement of constitutional democracy."

Komponen dari pendidikan kewarganegaraan yakni meliputi pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, serta sikap/watak kewarganegaraan. Komponen utama yakni pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang merupakan isi atau apa saja yang harus diketahui oleh warga negara yang meliputi pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non pemerintah, identitas nasional, *rule of law*, hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia, hak sipil, dan hak politik.

Dimensi keterampilan (*civic skills*) merupakan keterampilan apa yang harus dimiliki oleh warga negara yang mencakup keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi. Adanya dimensi keterampilan warga negara menjadikan warga negara dapat melihat dengan jelas dan mendeskripsikan kecenderungan-kecenderungan seperti berpartisipasi dalam kehidupan kewarganegaraan. Dimensi sikap/watak kewarganegaraan (*civic disposition*) berkaitan dengan karakter privat dan publik dari warga negara yang perlu dipelihara dan tingkatkan dalam demokrasi konstiusional. Menurut Branson (dalam Winarno, 2014:117) watak kewarganegaraan berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang di lingkungannya.

Civic engagement merupakan keterlibatan warga negara di dalam kegiatan sosial secara sukarela dan *trust* antar sesama warga negara. Partisipasi politik terbagi menjadi dua, yaitu partisipasi politik itu sendiri dan partisipasi sosial. Partisipasi sosial didefinisikan sebagai keterlibatan warga negara dalam kehidupan sosial atau *civic community*. Dengan kata lain, keterlibatan warga atau *civic engagement* dalam kelompok sosial menjadi ruh partisipasi sosial.

Berkembangnya *civic engagement* tidak terlepas dari keterlibatan warga negara dalam mengambil banyak bentuk keterlibatan seperti keterlibatan dalam sebuah organisasi maupun penyelenggaraan negara. Keterlibatan warga negara salah satunya dirancang dalam mengatasi empat tantangan yang ada seperti globalisasi, informasi komunikasi dan teknologi, pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, serta tumbuhnya demokratisasi dan demokrasi (United Nations, 2007:14).

Adanya keterlibatan warganegara memunculkan partisipasi yang notabene mampu menentukan sikap dan keterlibatan suatu individu maupun kelompok dalam kondisi organisasinya. Dari wujud keterlibatan tersebut maka mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan dan turut ambil bagian dalam setiap aktivitasnya yang diiringi dengan tanggung jawab.

Dalam ilmu politik, partisipasi diartikan sebagai upaya warga masyarakat baik secara individual maupun kelompok untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembentukan kebijakan publik dalam sebuah negara (Gaffar, 1998:240). Partisipasi perempuan dalam hal ini dilakukan oleh organisasi Fatayat NU yang bertujuan dalam membentuk *mindset* perempuan melalui pendidikan politik. Peran serta yang dilakukan Fatayat NU ini merupakan aktivitas Fatayat NU dalam bidang politik yang merupakan salah satu pencapaiannya yang diwujudkan dalam program kerja Fatayat NU.

Bentuk partisipasi lain yang dilakukan oleh Fatayat NU juga tercermin dalam bentuk partisipasi konvensional yang dijabarkan oleh Almond (dalam Gatara, 2007:98) dimana bentuk partisipasi ini meliputi pemberian suara yang dilakukan anggota Fatayat NU ketika ada momentum pemilihan umum, adanya diskusi politik dalam rangka merumuskan kebijakan publik, dan kegiatan kampanye tentang pentingnya pendidikan politik yang perlu dipahami oleh setiap warga negara demi mewujudkan adanya tatanan masyarakat yang secara ekonomi dan politik mandiri.

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah tentang partisipasi Pimpinan Cabang Fatayat NU Sidoarjo dalam pendidikan politik bagi perempuan. Hal tersebut dapat berguna untuk mendeskripsikan partisipasi Pimpinan Cabang Fatayat NU Sidoarjo dalam pendidikan politik bagi perempuan.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi dan mengungkap makna mengenai partisipasi Fatayat NU Pimpinan Cabang Sidoarjo dalam pendidikan politik yang diberikan bagi perempuan. Mengingat masih banyak perempuan yang kurang memiliki kesadaran dalam berpolitik menjadikan Fatayat NU sebagai organisasi keagamaan yang menaungi perempuan turut memberikan akses bagi perempuan dalam memahami politik melalui proses pendidikan politik. Tahapan dalam penelitian ini meliputi mengajukan pertanyaan guna mengetahui informasi terkait pelaksanaan pendidikan politik bagi perempuan, mengumpulkan data yang spesifik, menganalisis data yang didapat, hingga menafsirkan makna data (Creswell, 2010:4-5).

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk menggali informasi yang diinginkan atau membiarkannya muncul begitu saja dari para partisipan (Creswell, 2010:25). Menurut Bongdan dan Taylor (dalam Moleong, 2008:4), pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pemilihan desain kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah (Moleong, 2008:6).

Konsekuensi dari sifat penelitian kualitatif adalah ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh (Suprayogo, 2001: 162). Data primer dalam penelitian ini adalah pengurus Pimpinan Cabang Fatayat NU Sidoarjo, beberapa ketua Pimpinan Anak Cabang, dan catatan hasil wawancara. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumen dari kantor Pimpinan Cabang Fatayat NU Sidoarjo yang digunakan untuk mendukung sumber data primer.

Penelitian yang dilakukan ini bertempat di kantor PC Fatayat NU Sidoarjo di Jalan Airlangga No. 5-6, Sidoarjo. Alasan memilih Fatayat NU Pimpinan Cabang Sidoarjo karena Fatayat NU Pimpinan Cabang Sidoarjo menjalankan salah satu program kerja Fatayat NU dalam bidang politik seperti melakukan pendidikan politik untuk perempuan dan melakukan gerakan penyadaran hukum dan politik di masyarakat. Waktu penelitian adalah rentang waktu yang digunakan selama proses penyusunan proposal hingga penelitian berlangsung, mulai dari tahap persiapan sampai pada tahap penyerahan skripsi sesuai dengan sasaran penelitian.

Informan menurut Suharsimi (2006:145) didefinisikan sebagai orang yang memberi informasi. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai informan adalah orang yang dianggap benar-benar mengetahui dan memahami adanya proses pendidikan politik yang dilakukan oleh Fatayat NU PC Sidoarjo. Dalam menetapkan informan, digunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013:53). Pertimbangan untuk menentukan informan dipilih dengan kriteria informan diantaranya Aktif dalam kegiatan Fatayat minimal 5 tahun serta Pengurus Cabang dan pengurus Anak Cabang Fatayat NU PC Sidoarjo. Dengan demikian penelitian ini menggunakan empat informan dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Instrumen penelitian merupakan salah satu bagian dari penelitian yang memiliki peran dalam

mengumpulkan data sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian kualitatif permasalahan belum memiliki kejelasan dan kepastian sehingga yang menjadi instrumen adalah peneliti sendiri. Selanjutnya setelah fokus penelitian sudah cukup jelas maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri. Baik pada *grand tour question*, tahap *focused and selection*, melakukan pengumpulan data, sampai dengan pembuatan kesimpulan (Sugiono, 2013:61).

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data berupa wawancara mendalam dan dokumentasi. Proses wawancara ini memerlukan pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*open-ended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari pengurus Pimpinan Cabang Fatayat NU Sidoarjo dan tim turun ke bawah (turba) dari beberapa pengurus Pimpinan Anak Cabang. Lebih lanjut, wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data tentang (a) Pengenalan pengetahuan dan mengajak berorganisasi pada perempuan. (b) Bentuk partisipasi politik yang diajarkan pada perempuan. (c) Materi penyampaian terkait dengan pendidikan politik.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini sesuai yang dipaparkan oleh Miles dan Huberman (1984, dalam Suharsimi, 2006) yang menyatakan bahwa tahap analisis data dalam penelitian kualitatif secara umum dimulai sejak pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pengecekan keabsahan data diperoleh dengan triangulasi sumber untuk mendapat data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Selain itu pengecekan keabsahan data dengan menggunakan *member checking*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang partisipasi Fatayat Nahdlatul Ulama dalam pendidikan politik bagi perempuan dapat dideskripsikan tentang partisipasi Fatayat NU dalam pendidikan politik yang dikategorikan dalam dua sub yaitu bentuk partisipasi politik yang diberikan dan materi pendidikan politik yang disampaikan. Partisipasi mengindikasikan adanya suatu pergerakan dan perbuatan yang nyata, sehingga didalamnya muncul perubahan dan pembaharuan dalam bentuk sekecil apapun. Dalam ilmu politik, partisipasi diartikan sebagai upaya warga masyarakat baik secara individual maupun kelompok untuk ikut serta dalam

mempengaruhi pembentukan kebijakan publik dalam sebuah negara (Gaffar, 1998:240). Dalam kegiatan politik, peran perempuan masih kurang mendapatkan perhatian dari publik. Oleh karenanya, Fatayat NU berpartisipasi dengan melakukan pendidikan politik melalui kegiatan kajian, seminar, dan advokasi politik pada perempuan agar kesadaran perempuan dapat tumbuh dan berkembang.

Berdasarkan hasil penelitian tentang partisipasi Fatayat Nahdlatul Ulama dalam pendidikan politik bagi perempuan dapat dideskripsikan tentang partisipasi Fatayat NU dalam pendidikan politik yang dikategorikan dalam dua sub yaitu bentuk partisipasi politik yang diberikan dan materi pendidikan politik yang disampaikan, diperoleh suatu data dan dijabarkan sebagai berikut.

Bentuk Partisipasi Politik yang Diberikan Fatayat NU

Partisipasi mengindikasikan adanya suatu perbuatan yang nyata sehingga didalamnya muncul suatu perubahan dalam bentuk sekecil apapun. Partisipasi politik dilakukan warga negara dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan politik. Fatayat NU sebagai salah satu kelompok asosiasi memiliki partisipasi politik yang diberikan kepada perempuan baik kader maupun non kader. Untuk perempuan yang menjadi anggota Fatayat NU dilakukan pendekatan dalam forum untuk menumbuhkan partisipasi perempuan. Sedangkan untuk perempuan non kader dilakukan melalui pendekatan personal agar masyarakat mampu menyadari pentingnya warga negara berpartisipasi dalam mempengaruhi keputusan politik.

Dari kegiatan berorganisasi Fatayat memunculkan semangat dalam memberikan dorongan bagi para perempuan lain untuk terlibat dalam berbagai aktivitas kemasyarakatan hingga aktivitas politik. Dorongan tersebut tercermin dalam berbagai bentuk aktivitas. Salah satu aktivitas yang dilakukan Fatayat guna mendorong partisipasi perempuan adalah melalui pendekatan dalam sebuah forum. Berikut pernyataan Bu Nurul KorBid Politik, Hukum, dan Advokasi PC Fatayat NU Sidoarjo:

“...Memang kalau Fatayat itu kan usia produktif ya, kalau politik praktis itu memang bukan jalannya, tapi kalau untuk membantu, paling tidak kita adalah ujung tombak yang dibawah. Kita menggerakkan lah agar perempuan itu bisa aktif karena kan sangat disayangkan perempuan-perempuan usia produktif tetapi waktunya banyak dihabiskan dirumah. Pernah kita melalui Jam'iyah di ranting itu mengumpulkan perempuan-perempuan untuk ikut Jam'iyahan yah, tapi disamping itu juga kita ajak mereka aktif untuk

kegiatan-kegiatan yang nantinya akan kita lakukan...” (wawancara, Senin, 04 April 2016)

Aktivitas yang dilakukan Fatayat terkait dengan memberikan dorongan partisipasi perempuan dalam aktivitas kemasyarakatan hingga politik dilakukan melalui pendekatan dalam forum. Forum yang dimaksud ini adalah melalui Jam'iyah. Pendekatan melalui Jam'iyah dirasa tepat karena aktivitas yang dilakukan Fatayat ini dilaksanakan dalam lingkup desa dan diikuti oleh perempuan muda sehingga lebih efektif. Namun disisi lain aktivitas yang dilakukan Fatayat juga melalui pendekatan personal. Berikut pernyataan Bu Elok Wakil Sekretaris PC Fatayat NU Sidoarjo:

“...Untuk aktivitas Fatayat sendiri disamping kita memberi arahan melalui forum untuk para perempuan bisa terjun dalam kegiatan politik atau kemasyarakatan juga mengajaknya itu dengan cara pribadi meskipun masih banyak perempuan yang masih masa bodoh. Kalau forum bisa melalui kegiatan-kegiatannya Fatayat mbak, seperti Jam'iyah, kubro an, atau pelatihan-pelatihan seperti ini. Tapi menurut saya lebih efektif saat *face to face* karena kan itu tidak formal ya penyampaianya...” (wawancara, Jum'at 01 April 2016)

Selain melalui kegiatan Jam'iyah, pendekatan secara personal ini juga dianggap efektif karena tidak semua perempuan-perempuan muda tertarik untuk mengikuti Jam'iyah. Ketika dilakukan secara personal maka antara si pemberi dan penerima pesan tidak ada batas karena konteks Fatayat tersebut secara individu bukan pada konteks yang formal. Tentunya dalam pendekatan ini juga masyarakat merasa tidak digurui, hal inilah yang dimanfaatkan Fatayat untuk mendorong perempuan-perempuan muda agar lebih aktif dalam politik maupun aktivitas kemasyarakatan.

Berbagai aktivitas yang ada di Fatayat telah disesuaikan dengan kebutuhan berbagai bidang, salah satunya ialah dalam bidang politik. Salah satu agenda kegiatan yang dilakukan dibawah kontrol bidang politik adalah pada saat momen pemilihan umum. Momen pemilihan umum ini dimanfaatkan oleh Fatayat dalam menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan pada perempuan. Salah satu wujud partisipasi Fatayat ketika ada momen pemilu yaitu memberikan pengarahan dan sosialisasi pada perempuan. Berikut pernyataan Bu Nurul KorBid Politik, Hukum, dan Advokasi PC Fatayat NU Sidoarjo:

“...Kalau di PC itu setiap ada momen pemilihan pasti kita adakan sosialisasi. Biasanya dari Fatayat yang diwakili bidang Hukum, Politik, dan Advokasi bergandengan dengan pihak KPU. Sosialisasi tidak hanya

untuk kader tapi disamping itu juga perempuan di luar kader juga menerima hanya saja itu melalui jam'iyah ranting-ranting. Sosialisasinya sendiri ini tujuannya agar masyarakat terutama perempuan benar-benar memahami makna dari pemilihan umum itu sendiri bukan *money politic* nya saja yang dipikirkan....” (wawancara, Senin, 04 April 2016)

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan informan memperlihatkan bahwa ketika tiba momen pemilu maka Fatayat melakukan pengarahan dan sosialisasi kepada para perempuan dengan tujuan agar perempuan memahami makna dari proses pemilihan umum tersebut. Pengarahan dan sosialisasi ini dilaksanakan dari PC yang kemudian diteruskan ke PAC hingga ke ranting-ranting melalui Jam'iyah. Meskipun tidak seaktif PPKB namun Fatayat tetap memberikan kontribusinya dalam meningkatkan kualitas perempuan berpengetahuan luas yang dalam hal ini ialah memahami mekanisme pemilihan umum.

Berdasarkan studi awal yang dilakukan di Kecamatan Krembung, Sidoarjo pada minggu ke-dua bulan Nopember 2015, menunjukkan bahwa pengarahan dan sosialisasi dilakukan dengan cara mendatangi kegiatan PAC Fatayat NU Krembung yang memberikan sosialisasi ke ranting-ranting yang ada di kecamatan Krembung. Pengurus PC Fatayat NU Sidoarjo mengenakan *outers* putih yang menunjukkan bahwa mereka adalah tim turba (turun ke bawah) yang sedang menjalankan tugas dari Kabupaten atau Pimpinan Cabang. Sosialisasi dilakukan bertepatan dengan momen pelaksanaan pemilihan Bupati. Fatayat NU mengharapkan agar pada pemilihan Bupati tersebut masyarakat dapat menjadi pemilih yang cerdas, oleh karenanya Fatayat NU memberikan bekal pengetahuan berupa pendidikan politik.

Upaya pendidikan politik yang diberikan tercermin pada aktivitas Fatayat yang disematkan dalam forum jam'iyah yang dilakukan melalui kegiatan diba'an ataupun pengajian kitab (tergantung pelaksanaan di tiap ranting). Pelaksanaan pendidikan politik dimulai dalam lingkup kabupaten/PC yang kemudian diturunkan hingga pada tingkatan ranting. Jam'iyah yang sering melibatkan perempuan non kader ialah kegiatan jam'iyah yang dilaksanakan di desa atau pada tingkatan ranting. Berikut pernyataan dari Bu Ma'rufah Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU Sidoarjo:

“...Untuk Aktivitasnya kita ada seperti dari Fatayat ini juga memberikan pelatihan-pelatihan bagi para perempuan sehubungan dengan adanya moment-moment pemilu. Jadi tidak hanya memberikan pengetahuan untuk para kader tetapi juga memberikan bekal pengetahuan untuk perempuan-perempuan

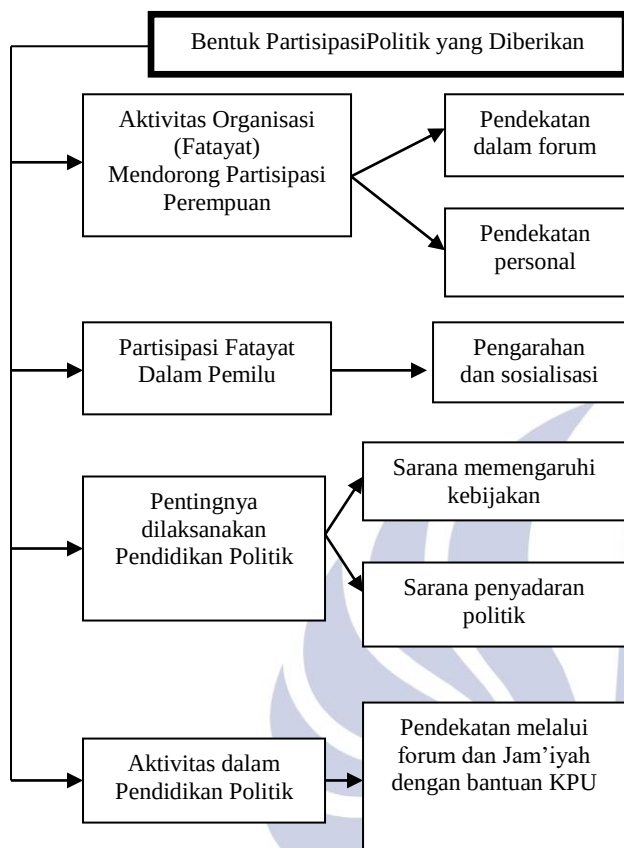
diluar Fatayat. Biasanya kalau untuk kader kita ada pertemuan rutin mbak, tetapi kalau yang melibatkan perempuan-perempuan di luar kader biasanya melalui kubro an tapi lebih seringnya waktu ada jam'iyah yang dilaksanakan di ranting-ranting itu tadi. Agenda seperti itu selain dari Fatayat juga didampingi dari KPU yang juga memfasilitasi alat peraganya. Selain itu juga pernah ada dulu sosialisasi Undang-Undang pemilu juga dari KPU. KPU itu kan untuk mendampingi teknisnya saja, mereka kan yang menyiapkan alat peraganya. Selebihnya kita (Fatayat) yang *handle*.” (wawancara, Senin 28 Maret 2016)

Pelatihan-pelatihan yang diberikan Fatayat disematkan dalam beberapa aktivitasnya termasuk pada momen pemilu yang menyematkan pendidikan politik terhadap perempuan melalui kegiatan Jam'iyah. KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu turut mendampingi Fatayat dalam mensosialisasikan hal-hal teknis menyangkut pemilu dengan memfasilitasi alat peraga untuk mempermudah proses sosialisasi, selanjutnya Fatayat yang menjadi penerus memberikan pengetahuan politik kepada perempuan. Hal ini juga dipertegas oleh pernyataan Bu Nurul KorBid Politik, Hukum, dan Advokasi PC Fatayat NU Sidoarjo:

“...Kalau mau momen pilihan biasanya kita menggandeng KPU untuk sosialisasinya tetapi kalau untuk ke tingkatan ranting bisanya melalui jam'iyah-jam'iyah itu lebih fokus. Kalau untuk kubroan jarang, lebih seringnya melalui jam'iyah mbak karena kan lebih langsung berhadapan dengan masyarakatnya jadinya lebih mudah menyampaikan pengetahuan seputar politiknya. (untuk non kader) Itu kita lihat *event* nya seperti apa, kalau untuk penyadaran politik ini kan memang melalui tingkatan ranting-ranting karena justru lebih fokus kalau disana...” (wawancara, Senin, 04 April 2016)

Proses pendekatan pada masyarakat dirasa lebih efektif melalui kegiatan Jam'iyah tingkatan ranting karena kegiatan tersebut dihadiri oleh anggota yang dalam lingkup desa sehingga mereka yang bukan anggota tidak canggung untuk sekedar mengikuti Jam'iyah ditingkatan desa. Hal tersebut dimanfaatkan Fatayat dalam memberikan pengetahuan politik pada masyarakat yang sebelumnya sudah diberikan arahan dari PC. Ketika sampai di masyarakat, Fatayat melalui pengurus ranting akan memberikan arahan serta gambaran pada perempuan mengenai pendidikan politik.

Berikut skema hasil penelitian mengenai bentuk partisipasi politik yang dilakukan Fatayat NU:



Bagan 1
Bentuk Partisipasi Politik Fatayat NU

Meskipun dihadiri oleh anggota Fatayat NU dari tingkatan ranting dan juga dari perempuan yang diluar anggota Fatayat, namun ketika proses memberikan pendidikan politik dilakukan, mereka yang hadir cenderung bersikap pasif. Hal tersebut ditunjukkan oleh kurangnya kesadaran dan rasa ingin tahu perempuan untuk bertanya ketika dari kader Fatayat NU memberikan pendidikan politik. Moment yang seharusnya dimanfaatkan oleh perempuan untuk menggali wawasan tentang kehidupan bernegara justru yang terlihat adalah antusias perempuan yang masih lemah. Berikut pernyataan dari Bu Ma'rufah Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU Sidoarjo:

"...Kalau itu (perempuan yang memiliki rasa ingin tahu) kan karena kita rantingnya banyak jadi ya beda-beda, tapi waktu saya juga memantau itu masyarakat jarang yang tanya-tanya, palingan cuma nyeletuk "dapat sangu gak mbak" gitu mbak. Tapi kalau dilingkungan PC sendiri kita justru banyak *sharing* dari pengalaman-pengalaman yang dilapangan itu...." (wawancara, Senin 28 Maret 2016)

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh ketua PC Fatayat NU Sidoarjo dan wakil sekretaris PC Fatayat NU Sidoarjo, dengan mengetahui latar belakang pendidikan perempuan yang berbeda di setiap rantingnya, Fatayat NU berusaha membingkai pendidikan politik agar mudah diterima oleh perempuan salahsatunya dengan cara menggunakan bahasa yang ringan. Namun dari materi yang disampaikan, perempuan masih kurang memiliki kesadaran untuk menanyakan informasi yang lebih mendetail terkait dengan pendidikan politik. Bagi masyarakat, diberikannya pendidikan politik terutama yang bertepatan dengan momen pemilihan umum cenderung dikaitkan dengan unsur-unsur yang berbau politik sehingga mereka kurang tertarik dan bahkan dari beberapa ada yang menanyakan "uang titipan" dari calon.

Berdasarkan studi awal, salah satu kegiatan Jam'iyah yang dilaksanakan di Celep Kecamatan Sidoarjo (Nopember 2015) dihadiri oleh sekitar 45 perempuan yang terdiri dari kader Fatayat NU dan perempuan non-kader. Pelaksanaan pendidikan politik saat itu bertepatan dengan moment pemilihan Bupati sehingga cara menyampaikan pendidikan politiknya dilakukan setelah acara pengajian yang kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan mekanisme yang berhubungan dengan pemilu. Dalam memberikan pendidikan politik ini tidak ada perempuan yang menanyakan informasi yang berkaitan dengan pendidikan politik tersebut.

Dari analisis hasil penelitian tersebut bentuk pelaksanaan pendidikan politik oleh Fatayat NU dilakukan kepada anggota Fatayat NU dan masyarakat umum. Pada anggota Fatayat NU dilakukan melalui forum pelatihan pendidikan politik di Pimpinan Cabang didukung oleh KPU dalam menyiapkan alat peraga. Sedangkan pada masyarakat dilakukan melalui jam'iyah (tim turun ke bawah) dan didukung oleh KPU dalam menyiapkan alat peraga. Kegiatan Jam'iyah dapat berupa pengajian, diba'an, maupun selepas istighotsah.

Materi Pendidikan Politik

Dalam memberikan pemahaman mengenai pendidikan politik, tentunya Fatayat memiliki gambaran materi yang akan disampaikan pada perempuan. Namun materi tersebut bukanlah materi yang diberikan secara formal seperti pendidikan politik yang diberikan di sekolah ataupun pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik terhadap kadernya. Materi yang disampaikan disini pembahasannya lebih mengalir dan tidak selalu menggunakan bahasa yang formal. Berikut pernyataan Bu Nurul KorBid Politik, Hukum, dan Advokasi PC Fatayat NU Sidoarjo:

"...Mungkin kita (Fatayat) bukan seperti PPKB ya yang terjun di politik praktisnya. Tetapi kita tetap memberikan kontribusi untuk

menyadarkan masyarakat terutama perempuan agar dia sebagai ibu rumah tangga mampu untuk membantu menularkan pandangan politik yang ideal itu seperti apa. Kalau untuk materi yang formal jelas tidak ada mbak karena materi yang formal biasanya dilakukan oleh partai-partai politik. meskipun begitu kita tetap lah memberikan gambaran bahwa masyarakat haruslah benar-benar memahami tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Ketika ada *black campaign* juga harus sadar, lalu yang lebih penting kita harus bisa menyadarkan mereka bahwa suara mereka benar-benar berharga untuk membawa arah bangsa 5 tahun kedepan. Kalau *black campaign* nya ini sendiri masih banyak yang kejadian, meskipun sudah masa tenang tapi ketika kita muter-muter masih saja ada yang ditemui dijalanan itu baru dipasang spanduk, kalau kita lapor polisi pun sudah tidak bisa apa-apa polisi nya. Dari dulu sudah seperti itu, jadi makanya kita menghimbau masyarakat agar ketika ada aktivitas politik diluar jadwal kampanye mereka (masyarakat) harus melporkan itu dan bisa saja mereka menegur, begitu lho...” (wawancara, Senin, 04 April 2016)

Menurut pernyataan Bu Nurul, meskipun materi yang diberikan oleh Fatayat bukanlah materi yang formal, namun Fatayat tidak asal dalam memberikan pendidikan politik. Hal-hal yang diberikan saat memberikan pendidikan politik biasanya meliputi penyadaran tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga negara, tentang kampanye hitam (*black campaign*) yang masih terjadi disekitar masyarakat, termasuk pada memberikan penyadaran kepada perempuan bahwa suara mereka lebih berharga dari politik uang yang selama ini berkembang di masyarakat. Hal yang sama juga disampaikan oleh informan lain termasuk oleh Bu Ma’rufah selaku Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU Sidoarjo, berikut pernyataannya:

“...Memang secara formal tidak ada materi, tetapi ketika kita memberikan pendidikan politik itu didalamnya ada pemahaman tentang apa saja hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, pandangannya seperti apa tentang politik, lalu ketika ada pemilihan kita berikan pengetahuan tentang golput, untung ruginya seperti apa, kita beritahu yah jika melihat orang mencurigakan pasang-pasang spanduk atau pas masa kampanye habis tapi masih ada yang kampanye berarti mereka harus lapor. Karena seperti itu kan sudah termasuk kampanye hitam kan, nah baru terakhirnya nanti kita selingi alat peraga dari KPU tadi agar mereka tidak bosan....” (wawancara, Senin 28 Maret 2016)

Adanya pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara diperlukan untuk diberikan pada perempuan agar mereka menyadari posisi mereka sebagai warga negara yang tidak hanya memiliki hak tetapi juga kewajiban sebagai warga negara. Hal tersebut berkaitan dengan momen pemilu karena momen pemilu merupakan refleksi bagi warga negara dalam memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam momen pemilihan umum, Fatayat juga memberikan gambaran mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemilu seperti golput, *black campaign*, maupun *money politics*.

Peristiwa yang kerap terjadi di masyarakat selama proses pemilu ialah adanya *money politics* yang diberikan oleh calon-calon tertentu. Disinilah letak partisipasi Fatayat bahwa Fatayat haruslah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya suara mereka yang akan membawa perubahan hingga 5 tahun kedepan. Dengan dinamika kehidupan ekonomi masyarakat seperti saat ini, adanya pemberian uang ketika masa-masa pemilu tentu menjadi cara yang efektif untuk membeli suara masyarakat. Hal tersebutlah dimanfaatkan Fatayat NU agar masyarakat tidak terjebak dengan pemberian dari pasangan calon yang diberikan dalam bentuk apapun. Berikut pernyataan Bu Elok Wakil Sekretaris PC Fatayat NU Sidoarjo:

“...Sebenarnya ya seperti itu tadi ketika ada momen-momen pemilihan umum misalkan kita sampaikan pengetahuan tentang demokrasi, kewajiban dan hak warga negara, lalu kalau pemilu ya kita beri gambaran bahwa ketika ada *money politics* itu menghasilkan sesuatu yang negatif karena itu kan sama saja dengan suara kita ini lho dibeli oleh orang, masa’ kita diam saja. Bagaimana caranya juga masyarakat jangan mau terlibat dalam *money politic*, maupun itu bentuknya uang ataupun sumbangan apapun ya jangan asal diterima. Lalu juga ada kita beri himbauan untuk tidak golput karna buat apa sih golput, sudah golput tapi kalau nanti program yang terpilih itu tidak sesuai dengan dia akhirnya dia protes, mecaci pemerintah, apakah itu warga negara yang baik? Tidak kan mbak. Nah itu semua kegiatannya masih melalui jam’iyah-jam’iyah, jarang kalau di momen kubro-an. Jadi lebih untuk menyadarkan perempuan-perempuan tersebut mbak lebih gampang....” (wawancara, Jum’at 01 April 2016)

Penuturan yang serupa juga disampaikan oleh Bu Nurul KorBid Politik, Hukum, dan Advokasi PC Fatayat NU Sidoarjo:

“...Tidak (materi tidak secara langsung), tapi kan masih ada gambaran-gambaran apa saja yang akan diberikan mbak jadi tidak asal.

Seperti tentang golput ya kita jabarkan kenapa kita tidak boleh golput, lalu seperti ada pemberian uang itu kan marak sekali apa lagi didesa-desa, masyarakat mau saja menerimanya tapi apakah implementasinya kemudian mereka mau mencoblos calon yang ngasih? Itukan belum tentu ya, makanya kita beri masukan terus agar masyarakat tidak terjebak seperti itu apalagi untuk masyarakat yang pendidikannya masih minim. Jadi kita berikan pengetahuan terus untuk menyadarkan betapa pentingnya hak warga negara ini untuk dilaksanakan..." (wawancara, Senin, 04 April 2016)

Sama halnya dengan *money politics*, kesadaran masyarakat untuk tidak golput pun perlu ditingkatkan. Menurut Fatayat NU, golput merupakan tindakan yang tidak baik. Penyadaran dan pemahaman yang dilakukan oleh Fatayat dilakukan agar masyarakat terutama perempuan tidak apatis terhadap kehidupan politik yang terjadi di lingkungannya. Gambaran yang diberikan Fatayat NU bahwa satu suara sangat menentukan segalanya, selain itu dengan memberikan hak suara kita maka secara langsung kita sebagai warga negara Indonesia sudah memberikan hak kita untuk membawa perubahan bangsa ke arah yang lebih baik. Berikut pernyataan dari Bu I'anatus Wakil Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU Sidoarjo:

"...Kalau di Jam'iyah selain mekanisme (pemilu) nya juga disampaikan agar masyarakat jangan golput, kan *eman* begitu kan. Fatayat kan banyak diikuti perempuan-perempuan muda, nah kita beri tahu suaranya anda-anda ini bisa lho nantinya membawa perubahan, asalkan tidak salah dalam memilih calon, visi misinya juga perlu dicermati. Lalu kalau ada yang ngasih uang untuk dukung si A, B, C ya jangan terpengaruh ya karena kita harus cerdas juga..." (wawancara, Jum'at 01 April 2016)

Senada dengan Bu I'anatus, Bu Ma'rufah selaku Ketua Pimpinan Cabang turut menambahkan mengenai gambaran tidak golput yang disampaikan oleh Fatayat NU:

"...Sebenarnya kan sahabat Fatayat ini kalau ada pemilu banyak sekali yang jadi tim KPPS dan itu tidak ada hubungannya sudah sama Fatayat karena kan diluar lini kita. Tapi dari situ kita tahu banyak bahwa ketika pemilu masih saja ada yang golput dengan berbagai alasan. Nah itu juga kan bisa kita jadikan masukan untuk membuat masyarakat itu lebih aktif lagi. Ketika ada proses pendidikan politik kita jadi bisa menyampaikan bahwa golput itu jangan dijadikan budaya. Alasan apapun itu sebenarnya dilihat untuk jangka panjangnya

apalagi yang golput tidak satu dua orang nah itu kan tambah hilang lagi partisipasi kita..." (wawancara, Senin 28 Maret 2016).

Partisipasi Fatayat dalam memberikan pendidikan politik memiliki tujuan agar perempuan memiliki bekal pengetahuan yang kuat tentang politik dan disamping itu juga sebagai sarana menyampaikan pesan agar masyarakat terutama perempuan dapat mengawal pelaksanaan demokrasi di Indonesia terutama dalam konteks lingkungannya. Pengetahuan yang baik tentang politik dapat mengarahkan perempuan pada pembuatan kebijakan-kebijakan yang pro dengan perempuan. Berikut pernyataan dari Bu I'anatus Wakil Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU Sidoarjo:

"...Tujuan yang pasti supaya perempuan itu tetap sadar betapa pentingnya diberikan pemahaman tentang politik agar kedepannya kita sebagai perempuan tidak terombang-ambing dengan kebijakan-kebijakan yang kontra dengan perempuan. Lebih-lebih jika perempuan bisa membawa ke legislatif dan memenuhi kuota yang 30% itu. Intinya agar banyak perempuan yang bisa sadar dan mengerti lah. Sehingga Fatayat ini kan membimbing..." (wawancara, Jum'at 01 April 2016)

Penuturan yang serupa juga disampaikan oleh Bu Nurul KorBid Politik, Hukum, dan Advokasi PC Fatayat NU Sidoarjo:

"...Dengan harapan bahwa masyarakat itu paham bahwa politik itu bukan uang tetapi kebijakan. Kita bekal perempuan dengan pemahaman politik sehingga ketika *black campaign* itu ada disekitar mereka, mereka tetap tahu apa yang harus mereka lakukan. Mata mereka juga akan lebih terbuka bahwasannya politik itu tidak kejam kalau kita dari awal sudah diberikan pondasi pengetahuan yang kuat tentang hal itu (politik). Kalau di desa-desa kan masyarakat dikasih 10-20 ribu sudah berangkat, tapi untuk mereka yang di kota kan juga masih lihat kalau ada pemilu itu apa saja visi dan misi dari calon-calon itu..." (wawancara, Senin, 04 April 2016)

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan informan memperlihatkan bahwa tujuan Fatayat dalam memberikan pemahaman politik kepada perempuan agar perempuan memaknai setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Ketika dalam pemilu masyarakat dibekali pengetahuan yang baik maka setidaknya peluang terjadinya *black campaign* pada masyarakat khususnya lapisan bawah dapat segera diminimalisir. Pengetahuan tentang politik yang kuat dapat menciptakan masyarakat yang sadar dan memiliki partisipasi politik yang aktif di lingkungannya.

Berdasarkan mekanisme pendidikan politik yang telah dilakukan oleh Fatayat tersebut, terdapat beberapa celah yang menjadikan proses tersebut menjadi tidak optimal. Oleh karenanya Fatayat memiliki pandangan akan impian pendidikan politik yang akan dilaksanakan berikutnya, seperti harapan agar pendidikan politik yang diberikan dapat diterima dan mampu meningkatkan pengetahuan politik perempuan. Dengan bekal pengetahuan tersebut, khususnya pada saat momen pemilu maka perempuan tidak ceroboh dalam memilih wakilnya yang akan bertahan hingga lima tahun kedepan. Berikut pernyataan dari Bu Ma'rifah Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU Sidoarjo:

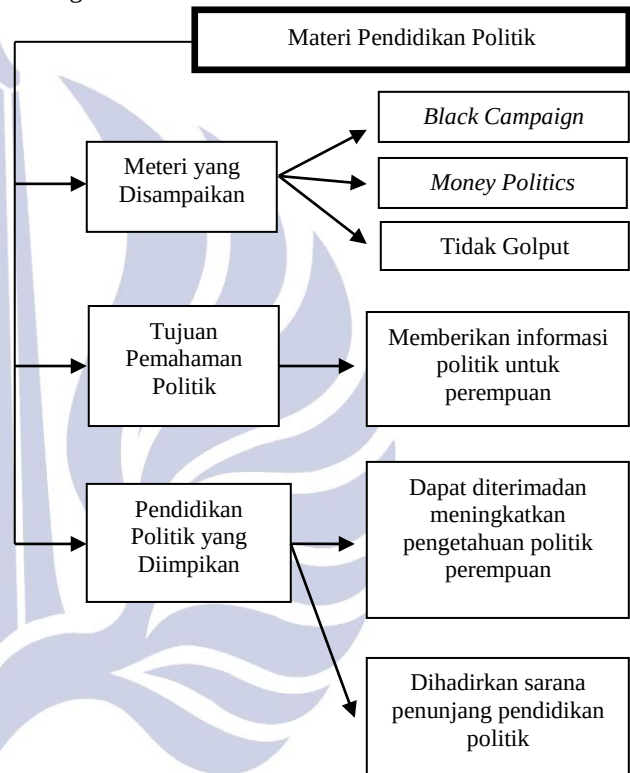
"...Tentunya kami berharap teman-teman itu ketika musim pemilu tidak salah pilih untuk jangka waktu 5 tahun makanya kita tidak bosan-bosan untuk memberikan sosialisasi supaya kita tidak salah pilih karena kalau salah pilih merugikan kita 5 tahun mendatang. Harapannya ya agar perempuan itu bisa memahami tentang politik meskipun politik stigma nya negatif di masyarakat awam tapi ketika perempuan diberi bekal politik yang memadai insyaallah akan tumbuh kesadaran di masyarakat. Untuk alat peraga insyaallah sudah cukup bagus dan mendukung yang dari KPU itu. Tapi untuk pendidikan politik sendiri kita masih kurang jadi mungkin semoga lah kita (Fatayat) bisa lebih optimal lagi..." (wawancara, Senin 28 Maret 2016)

Selain pendidikan politik yang menjadi impian Fatayat terletak pada penerimaan masyarakat akan pendidikan politik yang dilaksanakan, juga dengan dihidirkannya sarana yang menunjang pelaksanaan pendidikan politik tersebut. Sejauh ini Fatayat memberikan pendidikan politik melalui kegiatan jam'iyah yang diadakan di ranting-ranting sehingga tidak ada tempat dan jadwal khusus dalam memberikan pendidikan politik pada perempuan. Selain itu, alat peraga penunjang pendidikan politik juga masih minim dimiliki oleh Fatayat. Berikut pernyataan Bu Nurul KorBid Politik, Hukum, dan Advokasi PC Fatayat NU Sidoarjo:

"...Harapannya ya agar masyarakat mampu merubah mindset dan tidak hanya terfokus pada uang yang diberikan saja tetapi lebih dari itu masyarakat terutama perempuan harus mampu memanfaatkan pengetahuan tentang politik yang tidak hanya dari Fatayat saja mungkin dari pemerintah juga. Lalu untuk lebih efektifnya ya berharap ada alat peraga yang ideal untuk menunjang pendidikan politik itu sendiri..." (wawancara, Senin, 04 April 2016)

Pemenuhan alat peraga sebagai sarana pendukung proses pendidikan politik masih difasilitasi oleh KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu. Namun Fatayat sendiri belum memiliki sarana yang tepat untuk mendukung pelaksanaan pendidikan politik. Adanya alat peraga yang ideal diharapkan mampu meningkatkan minat perempuan untuk mengikuti aktivitas yang dilakukan Fatayat terkait dengan memberikan pendidikan politik sehingga mampu meningkatkan kesadaran politik masyarakat terutama para perempuan usia muda.

Hasil temuan data diatas dapat dikerangkakan sebagai berikut:



Bagan 2

Materi Pendidikan Politik

Fatayat memiliki partisipasi dalam memberikan pendidikan politik bagi perempuan. Hal tersebut tampak pada program kerja PC Fatayat NU Sidoarjo. Menurut Fatayat pentingnya berorganisasi ialah sebagai langkah awal bagi prestasi pencapaian individu dan untuk mencetak pengikut (kader) berkualitas. Manfaat mengikuti kegiatan Fatayat ialah dapat menambah pengalaman agar produktif serta menjaga ukhuwah sesama muslimah. Dari aktivitas Fatayat yang mendorong partisipasi perempuan ialah melalui aktivitas yang dilaksanakan diberbagai forum Fatayat dan dengan melakukan pendekatan personal kepada masyarakat.

Bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh Fatayat NU tercermin pada partisipasi dalam kegiatan pemilu dengan memberikan pengarahan dan sosialisasi untuk perempuan. Selain itu Fatayat juga memberikan pendidikan politik bahwa pentingnya diberikan

pendidikan politik sebagai sarana mempengaruhi kebijakan dan kesadaran politik. sedangkan aktivitas Fatayat NU dalam pendidikan politik tercermin pada kegiatan Jam'iyah dengan bantuan dari pihak KPU untuk menyediakan alat peraga.

Dalam memberikan pendidikan politik materi yang disampaikan tidaklah secara formal dengan memberikan gambaran tentang *black campaign*, *money politics*, dan tidak golput. Tujuan Fatayat dalam memberikan pendidikan politik ialah untuk memberikan informasi politik kepada masyarakat. Sehingga pendidikan politik yang diimpikan Fatayat ialah dapat diterima dan meningkatkan pengetahuan perempuan serta selanjutnya mampu menghadirkan sarana penunjangnya.

Pembahasan

Organisasi sebagai wujud berkembangnya demokrasi di suatu negara memiliki beberapa pengaruh penting bagi suatu warga negara. Salah satu pengaruh penting organisasi ialah sebagai wadah dalam membangun kapabilitas seseorang. Melalui kegiatan yang ada di organisasi menjadikan orang tersebut memiliki pengalaman yang dapat mengembangkan kapabilitas yang dimilikinya. Hal tersebut menjadikan organisasi ditempati oleh anggota-anggota yang produktif dan mampu memberikan sumbangsih nyata terhadap kehidupan bermasyarakat.

Salah satu organisasi yang berkembang di Indonesia ialah Fatayat NU. Fatayat NU sebagai organisasi keagamaan memiliki usaha dalam meningkatkan peran serta perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Dimana peran serta tersebut terwujud dalam aktivitas Fatayat NU di berbagai kegiatan baik formal maupun informal. Salah satu hal yang diberikan dalam meningkatkan kemampuan perempuan ialah melalui proses pendidikan politik yang diberikan Fatayat NU kepada perempuan baik kader maupun masyarakat. Adanya partisipasi yang dilakukan Fatayat NU mencerminkan betapa pentingnya perempuan dalam menerima berbagai pengetahuan termasuk politik dalam menunjang aktivitas kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011 yang dimaksudkan pendidikan politik ialah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam Undang-Undang diamanatkan perlunya pendidikan politik dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif warga negara, serta meningkatkan kemandirian dan kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jelas dari adanya Undang-Undang tersebut bahwa

pendidikan politik penting diberikan kepada setiap warga negara tak terkecuali perempuan guna memberikan kesadaran politik pada perempuan.

Fatayat NU PC Sidoarjo memberikan partisipasinya dalam pendidikan politik bagi perempuan melalui kegiatan struktural maupun kultural. Kegiatan struktural bersifat kelembagaan yang dilakukan secara formal kepada perempuan dari kader Fatayat yang berada di Pimpinan Cabang saja. Sedangkan kegiatan kultural bersifat personal yang dilakukan dengan cara merubah pandangan, memberikan ide, dan sosialisasi kepada perempuan secara umum baik anggota Fatayat lingkup Ranting hingga kepada masyarakat. Dalam menyampaikan pendidikan politik Fatayat NU tidak menggunakan metode khusus seperti pendidikan politik yang diberikan di sekolah ataupun pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik tetapi meskipun demikian Fatayat NU tetap memberikan gambaran kesadaran hak dan kewajiban warga negara seputar pemilu seperti golput, *black campaign*, maupun *money politics*.

Partisipasi yang ditunjukkan Fatayat NU melalui kegiatan struktural dilakukan secara formal oleh para kader Fatayat NU yang berada di lingkup Pimpinan Cabang atau setara dengan kabupaten. Pengurus yang ada di PC ini merupakan perwakilan dari PAC-PAC di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pendidikan politik yang dilaksanakan ini merupakan salah satu wujud dari peraturan dasar Fatayat NU yang tertera dalam pasal 6 ayat 5 yang digambarkan bahwa Fatayat NU memiliki usaha untuk mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan jender dan meningkatkan peran serta perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga dari pasal tersebut maka langkah awal Fatayat dalam memberikan pendidikan politik ialah diberikan terlebih dahulu kepada pengurus dalam tingkatan Pimpinan Cabang (PC).

Pendidikan politik yang diberikan dalam lingkup PC dilakukan oleh pengurus inti yang didampingi oleh KorBid Politik, Hukum, dan Advokasi PC Fatayat NU Sidoarjo. Aktivitas yang dilakukan secara struktural ini lebih mudah diterima oleh anggota Fatayat NU karena basic perempuan-perempuan muda ini memiliki penerimaan yang baik terhadap informasi baru yang didapatnya. Didampingi oleh KPU yang turut serta memberikan alat peraga guna menunjang pemahaman para perempuan. Pendidikan politik yang dilakukan disini adalah untuk memberikan penguatan pandangan politik kepada para kader agar selanjutnya mereka dapat menyampaikannya kepada masyarakat melalui tim turba (turun ke bawah). Selain itu, para kader diberikan pemahaman agar mereka sadar akan pentingnya politik dan diharapkan mereka mampu turut mempengaruhi

kebijakan dengan memenuhi kuota 30% perempuan di legislatif.

Dalam bidang politik, beberapa anggota Fatayat NU juga memiliki posisi kepengurusan di KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) selain itu yang berhubungan dalam hal mempengaruhi kebijakan juga ada jaring aspirasi yang dilakukan oleh anggota dewan ditingkat PC. Dari beberapa modal kegiatan politik tersebut maka Fatayat NU memiliki bekal untuk turut berpartisipasi dalam pendidikan politik bagi perempuan. Diharapkan dari pendidikan politik yang diberikan kepada kader Fatayat NU PC Sidoarjo mampu menguatkan pengetahuan kader perempuan muda Fatayat akan politik sehingga mereka dapat berpartisipasi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan mampu untuk meneruskan kepada masyarakat.

Secara kultural, partisipasi yang dilakukan Fatayat NU dengan memberikan pengetahuan politik kepada perempuan selain anggota Fatayat. Melalui tim turba/tim turun ke bawah, Fatayat NU menyampaikan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan merubah, memberikan ide, serta mensosialisasikan kepada perempuan. Fatayat NU memberikan penyadaran kepada perempuan agar mereka lebih memahami dan mampu merubah *mindset* mereka tentang kehidupan berpolitik di masyarakat. Penyampaian pendidikan politik kepada perempuan dilakukan melalui kegiatan yang dikerjakan di tingkatan ranting atau desa.

Melalui kegiatan jam'iyah seperti acara pengajian, diba'an, maupun selepas istighotsah yang dilakukan Fatayat ditingkatan ranting, perempuan diberikan bekal pengetahuan yang memungkinkan mereka memiliki kebudayaan politik yang ideal dengan tumbuhnya kesadaran untuk dapat mendukung sistem politik serta mampu mengawal kehidupan politik yang ada dilingkungannya. Semua hal tersebut diberikan Fatayat NU melalui kegiatan sosialisasi karena pada tingkatan ranting ini masyarakatnya memerlukan pendekatan yang informal untuk dapat menerima proses pendidikan politik tersebut. Selain itu kondisi masyarakat desa yang rentan dengan sikap apatis dan bahkan golput menjadikan Fatayat NU gencar dalam memberikan sosialisasi politik dengan harapan dapat merubah ide masyarakatnya.

Dalam konsep pendidikan politik menurut Labolo (2015) diberikannya pendidikan politik diharapkan mampu meningkatkan solidaritas politik warga negara dalam menjaga dan memelihara integritas bangsa. Sesuai dengan cita-cita Fatayat NU bahwa dengan menjadikan pendidikan politik sebagai salah satu program kerja Fatayat NU maka masyarakat khususnya perempuan diharapkan mampu meningkatkan kesadarannya akan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sebagai warga

negara sehingga hal tersebut mampu berpengaruh terhadap partisipasi politik warga negara.

Dalam kaitannya, *civic engagement* ditunjukkan oleh Fatayat NU selaku organisasi keagamaan memainkan keterlibatan di dalam kelompok sosial secara sukarela yang diberikan kepada perempuan. Dalam hubungan sosialnya dengan masyarakat, Fatayat NU melakukan partisipasi secara sukarela dalam pendidikan politik yang diharapkan dapat menumbuhkan pengetahuan dan partisipasi politik warga negara. *Civic engagement* dalam suatu kelompok sosial menjadi ruh adanya partisipasi sosial. Hal tersebut tampak pada kepedulian Fatayat NU melalui tindakan konkretnya memberikan pendidikan politik kepada perempuan baik itu kader maupun masyarakat umum.

Seperangkat hubungan yang horizontal antar orang-orang ini turut didefinisikan Putnam sebagai modal sosial. Menurut Putnam (dalam Syahra, 2003:6), modal sosial terdiri dari "*networks of civic engagements*" atau jaringan keterikatan sosial yang diatur oleh norma-norma yang menentukan produktivitas suatu kelompok masyarakat atau komunitas. Modal sosial juga sebagai prasyarat mutlak diperlukan bagi terciptanya tata pemerintahan yang baik dan efektif. Teori modal sosial dalam partisipasi Fatayat NU terlihat pada kehidupan sosialnya serta kepercayaan yang mendorong Fatayat NU dalam bertindak bersama secara efektif untuk mewujudkan perempuan yang sadar akan nilai-nilai kewarganegaraan dengan memberikan pendidikan politik bagi perempuan.

Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh Fatayat NU dilihat secara struktural berdasarkan susunan yang ada pada organisasi yang mewadahi dan mendorong terjadinya kegiatan-kegiatan kolektif yang bermanfaat bagi seluruh warga negara dalam hal ini memberikan pendidikan politik. Secara kultural diberikan nilai-nilai yang mendorong ke arah terciptanya tujuan bersama baik yang menjadi harapan Fatayat NU maupun masyarakat. Adanya nilai budaya sebagai modal sosial ini dianggap efektif diberikan kepada masyarakat karena dapat memungkinkan terpeliharanya hubungan yang harmonis dengan masyarakat melalui kegiatan Fatayat NU.

Peran serta Fatayat sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama dalam memberikan pendidikan politik menurut Ida (2003) merupakan gerakan sosial yang menjadi perwujudan dari tradisi paguyuban dikalangan nahdliyin dimana hubungan-hubungan informal dan kekerabatan sangat dijunjung tinggi. Hal tersebut merupakan salah satu bagian dari modal sosial diantara masyarakat dan Fatayat NU secara keseluruhan. Melalui partisipasinya, Fatayat merangkul masyarakat untuk lebih memiliki kepekaan terhadap sistem yang sedang terjadi di negaranya khususnya kepekaan terhadap isu-isu yang

berkaitan dengan perempuan sehingga dengan memfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi tersebut mampu meningkatkan pendayagunaan masyarakat.

Dalam mengembangkan kemampuan sebagai warga negara yang baik maka diperlukan adanya pendidikan kewarganegaraan atau *civic education* untuk membentuk seorang warga negara menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. *Civic education* memiliki tiga komponen yang perlu dimiliki oleh seorang warga agar menjadi cerdas, berakarakter, dan partisipatif, yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition*. Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) bisa disejajarkan dengan domain atau ranah kognitif, keterampilan/kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*) sejajar dengan domain atau ranah psikomotor, sedangkan sikap/watak kewarganegaraan (*civic disposition*) sejajar dengan domain atau ranah afektif (Winarno, 2014).

Civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan berkaitan dengan kandungan atau isi apa saja yang seharusnya diketahui oleh warga negara yang berkaitan dengan hak, kewajiban, atau peran sebagai warga negara dan pengetahuan yang mendasar tentang nilai-nilai universal dalam masyarakat demokratis. *Civic knowledge* berkenaan dengan apa saja yang perlu diketahui dan dipahami secara layak oleh warga negara. Dalam Permendiknas No.22 Tahun 2006, materi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) terjabar dalam 8 ruang lingkup kajian, yaitu Persatuan dan Kesatuan Bangsa; Norma, Hukum, dan Peraturan; Hak Asasi Manusia; Kebutuhan Warga Negara; Konstitusi Negara; Kekuasaan dan Politik; Pancasila; dan Globalisasi.

Civic Skills atau keterampilan kecakapan kewarganegaraan merupakan kemampuan mengartikulasikan keterampilan kewarganegaraan (dalam pembuatan kebijakan publik, kontrol terhadap penyelenggaraan negara). *Civic Skills* meliputi kecakapan intelektual (*intellectual skills*) dan keterampilan partisipatoris (*participatory skills*) warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kecakapan intelektual penting untuk seorang warga negara yang berpengetahuan, efektif, dan bertanggung jawab. Sedangkan kecakapan partisipatoris merupakan kecakapan yang dibutuhkan untuk partisipasi yang bertanggung jawab, efektif, dan ilmiah, dalam proses politik dan dalam *civil society*.

Civic Disposition atau watak kewarganegaraan menunjuk pada karakter publik atau privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional. Watak kewarganegaraan berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami seseorang di rumah, sekolah, komunitas, dan organisasi-organisasi *civil society*.

Adanya pengalaman-pengalaman tersebut menumbuhkan pemahaman bahwa tumbuhnya demokrasi mensyaratkan adanya pemerintahan mandiri yang bertanggung jawab dari tiap individu.

Dalam aplikasinya, *civic knowledge* yang dilakukan oleh Fatayat NU ialah pada saat melakukan kegiatan memberikan pengetahuan politik Fatayat memberikan materi seputar *black campaign*, *money politics*, dan larangan golput yang diselengi dengan penyadaran akan hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai warga negara. Materi tersebut disampaikan oleh Fatayat NU dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar masyarakat memiliki wawasan yang baik mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara terlebih pada moment tersebut berkaitan dengan pemilihan umum yang rawan akan terjadinya *black campaign*, *money politics*, hingga memilih untuk golput.

Sebagai bagian dari keterampilan kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*), keterampilan partisipatif (*participatory skills*) ditunjukkan oleh warga negara dalam memengaruhi jalannya pemerintahan, pengambilan putusan publik, berkoalisi, mengelola konflik, dan sebagainya. Dalam hal ini Fatayat NU merupakan sekumpulan warga negara yang memiliki jaringan untuk bertindak bersama secara sukarela untuk menjadikan masyarakat berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik hingga melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Namun untuk *civic disposition*, Fatayat NU tidak memiliki peran didalamnya karena kegiatan yang dilakukan Fatayat NU kepada anggota maupun masyarakat tidak terlibat pada penyelesaian persoalan warga negara. Akifitas yang dilakukan Fatayat NU memiliki tujuan dalam memberdayakan masyarakat melalui program kerjanya sehingga fokus Fatayat NU selain pada kegiatan keagamaan juga pada aktivitas mengembangkan kemampuan masyarakat khususnya perempuan. Fatayat NU tidak memiliki peran yang mengarahkannya dalam mengkritik pemerintah maupun menyelesaikan persoalan warga negara yang lain sehingga dilihat pada komponen yang dimiliki oleh warga negara, Fatayat NU tidak memainkan peran sebagai *civic disposition*.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa Partisipasi dalam pendidikan politik yang dilakukan oleh PC Fatayat NU Sidoarjo dilakukan dengan secara struktural dan kultural. Partisipasi yang ditunjukkan Fatayat NU melalui kegiatan struktural dilakukan secara formal oleh para

kader Fatayat NU yang berada di lingkup Pimpinan Cabang atau setara dengan kabupaten. Pendidikan politik yang dilaksanakan ini merupakan salah satu wujud dari peraturan dasar Fatayat NU yang tertera dalam pasal 6 ayat 5 yang digambarkan bahwa Fatayat NU memiliki usaha untuk mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan jender dan meningkatkan peran serta perempuan dalam proses pengambilan keputusan.

Secara kultural, partisipasi yang dilakukan Fatayat NU dengan memberikan pengetahuan politik kepada perempuan selain anggota Fatayat. Melalui tim turba/tim turun ke bawah, Fatayat NU menyampaikan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara dengan merubah, memberikan ide, serta mensosialisasikan kepada perempuan. Secara kultural kegiatan dilaksanakan dalam forum jam'iyah seperti pada acara pengajian, diba'an, maupun selepas istighotsah.

Dalam melaksanakan partisipasinya memberikan pendidikan politik pada perempuan, Fatayat tidak menggunakan materi yang terstruktur seperti seperti pada pelaksanaan pendidikan politik yang diberikan di sekolah ataupun pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik terhadap kadernya. Materi yang disampaikan disini pembahasannya lebih mengalir dan tidak selalu menggunakan bahasa yang formal. Gambaran materi yang diberikan oleh Fatayat NU ialah berkaitan dengan pemilu seperti golput, *black campaign*, maupun *money politics* yang diselingi dengan penyadaran akan hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai warga negara.

Saran

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh pada saat penelitian, maka berikut ini saran peneliti Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan Fatayat NU secara kultural memang dapat dilaksanakan dengan mudah karena pendekatan yang dilakukan ialah turun ke bawah. Namun Fatayat NU harus dapat membingkai proses pendidikan politik sedemikian rupa agar masyarakat antusias dengan pendidikan politik yang disampaikan oleh Fatayat NU. Salah satunya adalah diselingi dengan memfasilitasi alat peraga yang mumpuni. Untuk alat peraga lebih baik jika minimal di setiap ranting disediakan agar masyarakat lebih antusias. Selain itu, pelaksanaan pendidikan politik yang bertepatan dengan moment pemilu perlu diperbaiki oleh karenanya diperlukan waktu dan agenda yang terstruktur agar mindset masyarakat akan pelaksanaan pendidikan politik tidak hanya dikaitkan dengan partai tertentu saja terlebih Fatayat merupakan basis NU dimana Nahdlatul Ulama sendiri identik dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar.2011.*Komunikasi Politik: Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi-dan Komunikasi Politik Indonesia*.Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arikunto, Suharsimi.2006.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.Jakarta: Rineka Cipta
- Azra, Azyumardi.2005.*Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*.Jakarta: Prenada Media
- Creswell, John W.2010.*Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Gaffar, Afan.1998.*Merangsang Partisipasi Politik Rakyat*.Jakarta: Pustaka Cidesindo
- Gatara, A.A. Said dan Said, Dzulkiah.2007.*Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*.Bandung: Pustaka Setia
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti.2012.*Negara, Demokrasi, dan Civil Society*. Yogyakarta: Graha ilmu
- Hidayat, Komarudin dan Azra, Azyumardi.2008.*Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*.Jakarta: Prenada Media Group
- Hikam, Muhammad AS.2015.*Demokrasi dan Civil Society*.Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia (edisi e-book)
- Labolo, Muhadam dan Ilham, Teguh.2015.*Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*.Jakarta: Rajawali Pers
- Sugiyono.2011.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*.Bandung: Alfabeta
- United Nations.2007.*Civic Engagement in Public Policies*.New York: United Nations
- Winarno.2014.*Pembelajaran PendidikanKewarganegaraan*.Jakarta: PT Bumi Aksara
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No.2/2011 tentang Partai Politik
- Ida, Laode.2003.*Gerakan Sosial Kelompok NU Progresif*.jurnal sosiologi. No.12, 2003.ISSN: 0852-8489.Disertasi diterbitkan.Depok: Universitas Indonesia
- Syakra, Rusydi.2003.*Modal Sosial: Konsep Dan Aplikasi*.jurnal masyarakat dan budaya.Vol 05,No.01.
- Kasmuri.2011.*Peran Fatayat Nahdlatul Ulama Wilayah Demak Dalam Mendorong Keterwakilan Politik Perempuan Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Demak 2009*.Tesis diterbitkan.Semarang: Universitas Negeri Semarang

Rahmaniah, Aniek.2007.*Pendidikan Demokrasi Pada Organisasi Perempuan Pengalaman Aisyiyah*.Tesis tidak diterbitkan.Surabaya: Universitas Airlangga

Jahidi, Ida.2004.*Peranan Masyarakat Sipil Menuju Sistem Pemerintahan Negara Yang Demokratis*.bandung: Universitas Padjadjaran

Wahyuningsih, Eka.2013.*Konstruksi Pendidikan Politik Pada Sekolah Menengah Atas di Kota Pangkalpinang*.Jakarta: Universitas Pendidikan Indonesia

Hamzah, Z.2013.Fatayat Nu Fokus Advokasi Perempuan.Tersedia di:
m.republika.co.id/berita/koran/news-update/13/04/27/mlvid3-fatayat-nu-fokus-advokasi-perempuan. [13 Januari 2016]

<https://mtsfalakhiyah.wordpress.com/2010/12/29/fatayat-nu/> [10 Juni 2016]

indonesia.ucanews.com/2013/06/21/perempuan-masih-hadapi-kendala-dalam-dunia-politik/



UNESA

Universitas Negeri Surabaya